

ABSTRAK

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana peran Bappeda dalam kebijakan pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Pangandaran? Sedangkan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran Bappeda dalam kebijakan pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Pangandaran. Kajian teori yang mendasari penelitian ini terdiri dari teori tentang kebijakan publik, implementasi kebijakan dan pembangunan infrastruktur. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara sebagai metode utama, metode perlengkapan adalah observasi dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut proses perumusan kebijakan teknis dalam bidang perencanaan pembangunan infrastruktur jalan dapat dilihat dalam proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang terdiri dari Musrenbang desa, Musrenbang kecamatan, dan Musrenbang RKPD Kabupaten. Tahapan kebijakan pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Pangandaran terdiri dari proses perencanaan, penyelenggaraan kebijakan publik dan pengawasan. Adapun peran Bappeda dalam perumusan kebijakan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Pangandaran sudah berjalan dan dapat dilihat dari penyusunan rancangan awal, pengumpulan laporan SKPD, penyelenggaraan Musrenbang, penyusunan rancangan akhir dan penetapan peraturan daerah. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi proses perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan jalan yaitu faktor pendukung yang terdiri dari adanya koordinasi, partisipasi masyarakat, serta komitmen pemerintah dan faktor penghambat terdiri dari penyesuaian/kesiapan anggaran, usulan yang terlalu banyak, serta keterbatasan dokumen penunjang.

Kata Kunci : Peran Bappeda, Pembangunan Infrastruktur